

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari

prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah :

- merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- menyusun Program dan Programa Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- pengembangan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- pengawasan Mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/ bibit Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- pengawasan penggunaan sarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- pembinaan Produksi di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- pengendalian dan penanggulangan hama penyakit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- memberi izin usaha/rekomendasi teknis Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

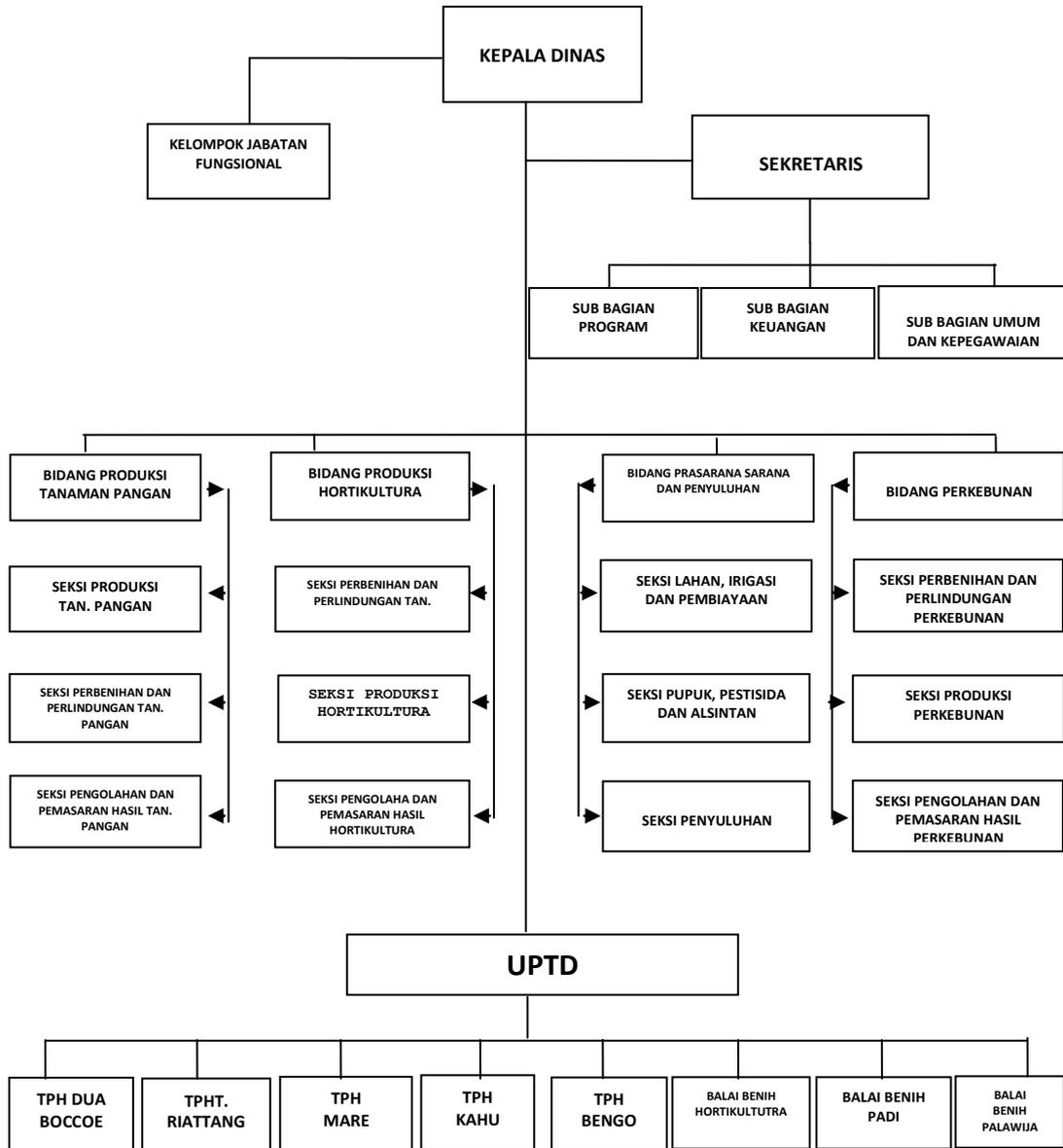
Susunan kepegawaian dan jumlah personil Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari :
1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan alat mesin pertanian
 3. Seksi Penyuluhan Pertanian
- d. Bidang tanaman pangan terdiri dari :
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan
- e. Bidang Hortikultura terdiri dari :
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
 2. Seksi Produksi Hortikultura
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Hortikultura
- f. Bidang Perkebunan terdiri dari :
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
 2. Seksi Produksi Perkebunan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan
- g. UPTD
- h. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone



KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam melaksanakan urusan Pertanian selama tahun 2018, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan didukung oleh Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja OPD.

Rincian pegawai PNS menurut golongan sebagai berikut :

- Golongan IV : 38 orang
- Golongan III : 91 orang ,
- Golongan II : 27 orang
- Golongan I : - orang

Perincian Pegawai (PNS) menurut struktur jabatan adalah :

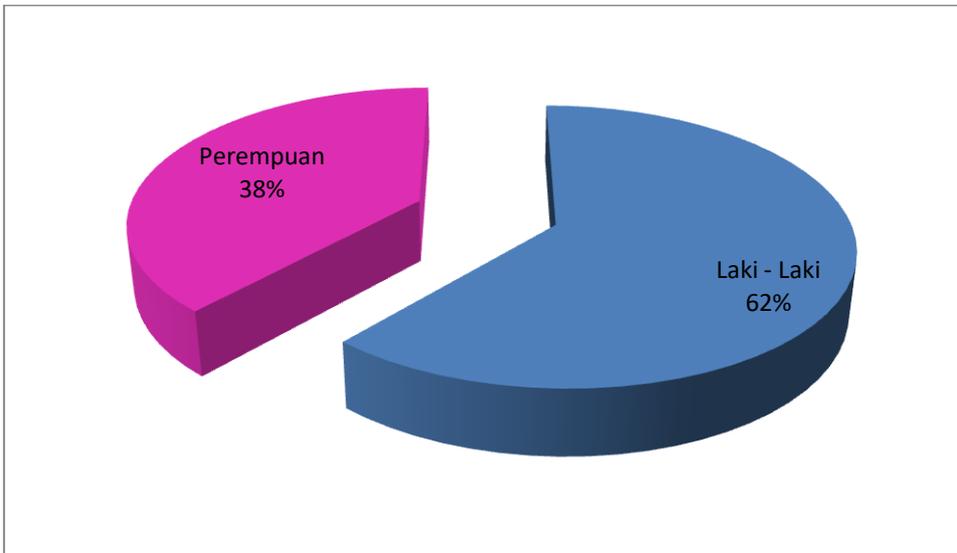
- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 31 orang
- Staf : 40 orang

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – Laki	96	
2	Perempuan	60	

Gambar 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

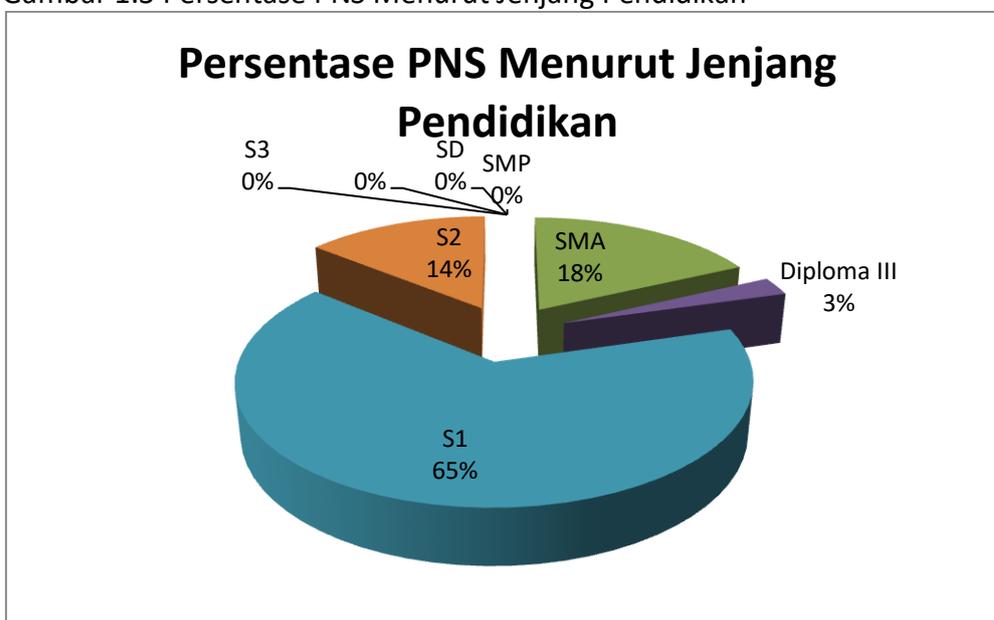


Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tamat SD	-	
2	Tamat SMP	-	
3	Tamat SMA	28	
4	Diploma III	4	
5	S1	102	
6	S2	22	
7	S3		

Gambar 1.3 Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Rincian pegawai PNS menurut golongan sebagai berikut :

- Golongan IV : 38 orang
- Golongan III : 91 orang ,
- Golongan II : 27 orang
- Golongan I : - orang

Perincian Pegawai (PNS) menurut struktur jabatan adalah :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 31 orang
- Staf : 40 orang

ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

1. Belum berkembangnya sistem usahatani dan belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan pertanian dalam sistem usahatani
2. Memaksimalkan kebijakan subsidi dalam bentuk benih, pupuk atau kredit pertanaman
3. Memaksimalkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan
4. Tuntutan standarisasi produk dan proses budidaya pertanian / perkebunan
5. Tuntutan kandungan pangan yang tidak berbahaya dan kendala residu bahan kimia
6. Tuntutan integrasi pengelolaan rantai pasok
7. Peningkatan kualitas mutu dan keamanan pangan
8. Belum berkembangnya inovasi teknologi spesifik
9. Masih rendahnya tingkat keuntungan usahatani pendapatan petani melalui pengembangan usaha agribisnis
10. Peningkatan kualitas mutu dan keamanan pangan
11. Kelembagaan atau regulasi yang menghambat
12. Pemanfaatan infrastruktur pertanian meliputi sarana dan prasarana seperti irigasi, jalan usaha tani, alat mesin, benih, bibit dan pupuk
13. Masih rendahnya akses petani terhadap permodalan dalam mengembangkan usahatannya
14. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditi andalan perkebunan khususnya kakao, cengkeh, kelapa dalam, kopi dan kapas
15. Penerapan pengelolaan tanaman terpadu
16. Masih rendahnya daya saing hasil-hasil pertanian dan perkebunan
17. Rendahnya minat generasi muda dalam berusahatani di sektor pertanian dan perkebunan
18. Masih rendahnya partisipasi masyarakat mengikuti pertemuan ditingkat-tingkat kelompok-kelompok tani
19. Peran penyuluh sebagai mediator pada pihak permodalan belum maksimal
20. Kompetensi penyuluh masih perlu ditingkatkan
21. Tingkat pengetahuan petani masih rendah untuk mengadopsi teknologi yang ada
22. Masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan
23. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian
24. Belum adanya jaminan harga pada saat panen raya khususnya komoditi kedelai
25. Masih terbatasnya sarana pasca panen khususnya untuk komoditi yang mudah rusak.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 25 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 maka pada tahun 2018 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan. Secara keseluruhan telah ditetapkan 11 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 7 program dan 16 kegiatan. Selanjutnya target sasaran tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang pada tahun 2018 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terfasilitasinya peningkatan SDM aparat dan petani melalui	1. Persentase Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Keluarganya 2. Persentase berkembangnya penerapan teknologi pertanian 3. Persentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan perkebunan	% % %	100 100 100
2	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pangan utama untuk petani dan masyarakat	%	100
3	Terbentuknya jejaring antar stakeholder pertanian dalam bentuk kerjasama (memorandum of understanding)	1. Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian TPHP 2. Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah tentang LP2B Kabupaten Bone	dokumen dokumen	5 3
4	Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan yang berdaya saing	1. Persentase peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	%	100
5	Berkembangnya usahatani yang ramah lingkungan dalam kegiatan agribisnis	1. Persentase peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan berkelanjutan	%	100
6	Peningkatan Kapasitas kelembagaan pertanian yang mendukung kesempatan kerja dan berusaha yang produktif bagi kelompok tani dan taruna tani di pedesaan	1. Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 2. Persentase Standarisasi Kualitas Bahan Baku Komoditas Pertanian 3. Persentase peningkatan sistem database produksi pertanian di 5 UPTD	% % %	100 100 100
7	Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1. Persentase perkembangan investasi dan kemitraan usaha dibidang pertanian/ perkebunan	%	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2. IKU Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian dan perkebunan yang berdaya saing.	Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan:			Laporan Tahunan	Bidang produksi tanaman pangan, Bidang Hortikultura Bidang Perkebunan
	a. Padi	Ton/ha	-		
	b. Jagung	Ton/Ha	-		
	c. Kedelai	Ton/Ha	-		
	d. Kacang Tanah	Ton/Ha	-		
	e. Kacang hijau	Ton/Ha	-		
	f. Ubi Kayu	Ton/Ha	-		
	g. Ubi Jalar	Ton/Ha	-		
	h. Bawang Merah	Ton/Ha	-		
	i. Kakao	Ton/Ha	-		
	j. Kelapa	Ton/Ha	-		
	k. Tebu	Ton/Ha	-		
	l. Kapas	Ton/Ha	-		
	m. Kemiri	Ton/Ha	-		
	n. Cengkeh	Ton/Ha	-		
	Jumlah produktivitas hasil tanaman pangan (kw/ha):				
	Produktivitas Padi	Kw/ha	$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$		
	Produktivitas Jagung	Kw/ha	$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$		
Produktivitas Kedelai	Kw/ha	$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$			
Produktivitas Kacang Tanah	Kw/ha	$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$			
Produktivitas Kacang Hijau	Kw/ha	$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$			
Produktivitas Ubi Kayu	Kw/ha	$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$			
Produktivitas Ubi Jalar	Kw/ha	$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$			

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 43.313.047.411,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	13.044.392.411,-	29,38
2	Belanja Langsung	30.268.655.000,-	70,62
Jumlah		43.313.047.411,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Sasaran 1: Terfasilitasinya peningkatan SDM aparat dan petani melalui pelatihan-pelatihan/bimbingan teknis pertanian	Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi tanaman pertanian/ perkebunan	- Program peningkatan kesejahteraan petani		8,63
		a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	300.000.000,-	0,99
		b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	159.100.000,-	0,52
		c. Pemberdayaan Petani dan Pelaku Agribisnis	183.100.000,-	0,60
		d. Pembinaan Petani	979.000.000,-	3,23

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
		<p>dan Pelaku Agribisnis</p> <p>- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan</p> <p>b. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan</p>	<p>337.810.000,-</p> <p>661.600.000,-</p>	<p>1,11</p> <p>2,18</p>
<p>Sasaran 2 : Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian yang mendukung kesempatan kerja dan berusaha yang produktif bagi kelompok tani dan taruna tani di pedesaan</p>	<p>- Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan</p> <p>- Persentase standarisasi kualitas bahan baku komoditas pertanian</p> <p>- Persentase peningkatan sistem database produksi pertanian di 5 UPTD</p>	<p>- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan:</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan</p> <p>b. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan</p> <p>- Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku:</p> <p>a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi</p>	<p>337.810.000,-</p> <p>661.600.000,-</p> <p>200.500.000,-</p>	<p>3,95</p> <p>1,11</p> <p>2,18</p> <p>0,66</p>
<p>Sasaran 3: Tersedianya prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p>	<p>Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pangan utama untuk petani dan masyarakat</p>	<p>- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan :</p> <p>a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna</p> <p>b. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan</p>	<p>19.471.772.050,-</p> <p>200.000.000,-</p>	<p>64,98</p> <p>64,32</p> <p>0,66</p>

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Sasaran 4: Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian yang berdaya saing	- Persentase peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	- Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan: a. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan b. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija c. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering d. Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan e. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	350.957.000,- 3.513.965.000,- 84.515.000,- 223.090.000,- 1.130.502.950,-	18,26 1,15 11,60 0,27 0,73 3,73
Sasaran 5 : Berkembangnya usahatani ramah lingkungan dalam kegiatan agribisnis	- Persentase peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan berkelanjutan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian: a. Pengembangan Bibit Unggul Berkelanjutan	236.286.000,-	0,78 0,78
Sasaran 7 : Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura	- Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan - Persentase perkembangan investasi dan kemitraan usaha di bidang pertanian/ perkebunan	- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan a. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna - Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan a. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	300.000.000,- 73.000.000,-	1,23 0,99 0,24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018 dengan realisasinya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Pengukuran kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018 mengacu pada **Indikator Kinerja Utama**. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2018 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Capaian hasil dari pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Tahunan dan data – data masing-masing bidang dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi*

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terfasilitasinya peningkatan SDM aparat dan petani melalui	1	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Keluarganya	%	100	11.66	46.44
		2	Persentase berkembangnya penerapan teknologi pertanian	%	100	96.86	96.86

		3	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan perkebunan	%	100	94.77	94.77
2	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pangan utama untuk petani dan masyarakat	%	100	96.91	96.91
3	Terbentuknya jejaring antar stakeholder pertanian dalam bentuk kerjasama (memorandum of understanding)	1	Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian TPHP	dokumen	5	5	100
		2	Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah tentang LP2B Kabupaten Bone	dokumen	3	3	100
4	Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan yang berdaya saing	1	Persentase peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	%	100	98.10	98.10
5	Berkembangnya usahatani yang ramah lingkungan dalam kegiatan agribisnis	1	Persentase peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan berkelanjutan	%	100	99.06	99.06
6	Peningkatan Kapasitas kelembagaan pertanian yang mendukung kesempatan kerja dan berusaha yang produktif bagi kelompok tani dan taruna tani di pedesaan	1	Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	%	100	94.77	94.77
		2	Persentase Standarisasi Kualitas Bahan Baku Komoditas Pertanian	%	100	99.56	99.56
		3	Persentase peningkatan sistem database produksi pertanian di 5 UPTD	%	100	98.81	98.81
7	Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1	Persentase perkembangan investasi dan kemitraan usaha dibidang pertanian/ perkebunan	%	100	85.17	85.17

Berdasarkan tabel 3.2. di atas terlihat bahwa sebagian besar indikator mendekati atau sama dengan 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun ada 1 (satu) indikator yang jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu hanya 46,44%. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) hal: pertama, terdapat kegiatan Sekolah Lapang yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan musim tanam; kedua Alokasi anggaran terdapat pada anggaran parsial sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan diantaranya Sekolah Lapang dan kegiatan lain yang mengikuti kegiatan Sekolah Lapang tersebut.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian dan perkebunan yang berdaya saing.	1. Produktivitas Padi (Kw/ha)	58.85	59.03	100.31
	2. Produktivitas Jagung (Kw/ha)	52.09	55.89	107.30
	3. Produktivitas Kedelai (Kw/ha)	18.47	19.42	105.12
	4. Produktivitas Kacang Tanah (Kw/ha)	17.09	17.65	103.28
	5. Produktivitas Kacang Hijau (Kw/ha)	13.73	15.66	114.06
	6. Produktivitas Ubi Kayu (Kw/ha)	100.27	94.38	94.12
	7. Produktivitas Ubi Jalar (Kw/ha)	88.84	85.583	96.34
	8. Jumlah produksi padi (Ton)	1,040,780	1,428,883	137.29
	9. Jumlah produksi jagung (ton)	186,755	402,486	215.52
	10. Jumlah produksi kedelai (ton)	22,482	13,047	58.03
	11. Jumlah produksi Kacang Tanah (ton)	3,249	4,960	152.66
	12. Jumlah produksi Kacang Hijau (ton)	11,802	1,062	9.00
	13. Jumlah produksi ubi kayu (ton)	5,159	3,058	59.28
	14. Jumlah produksi ubi jalar (ton)	4329	8.199	0.19
	15. Jumlah produksi bawang merah (ton)	16,500	25,618	155.26
	16. Jumlah produksi cabe rawit (ton)	16,000	16,029	100.18
	17. Jumlah produksi sukun (ton)	47,000	40,051	85.21
	18. Jumlah produksi pisang (ton)	16,000	22,959	143.49
	19. Jumlah produksi nangka (ton)	4,500	2,421	53.80

	20. Jumlah produksi kakao (ton)	10,117	10,692	105.68
	21. Jumlah produksi kelapa (ton)	14,126	14,282	101.10
	22. Jumlah produksi tebu (ton)	36,012	40,561	112.63
	23. Jumlah produksi cengkeh (ton)	4,628	4,949	106.94

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel di atas maka sasaran strategis memiliki capaian kinerja 91 ke atas atau masuk dalam kriteria sangat tinggi/sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh indikator sasaran strategis yang juga merupakan indikator kinerja utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah berhasil diwujudkan bahkan beberapa di antaranya telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun terdapat juga indikator yang tidak mencapai target karena beberapa komoditi tanaman memiliki produksi yang rendah disebabkan tanaman diserang hama dan penyakit dan terdapat tanaman yang sudah tidak produktif karena telah berumur tua.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
		2018	2017	2016
Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian dan perkebunan yang berdaya saing.	1. Produktivitas Padi (Kw/ha)	59.03	58.80	57.89
	2. Produktivitas Jagung (Kw/ha)	55.89	55.53	56.00
	3. Produktivitas Kedelai (Kw/ha)	19.42	19.24	18.49
	4. Produktivitas Kacang Tanah (Kw/ha)	17.65	18.11	17.69
	5. Produktivitas Kacang Hijau (Kw/ha)	15.66	12.42	13.96
	6. Produktivitas Ubi Kayu (Kw/ha)	94.38	93.89	96.13
	7. Produktivitas Ubi Jalar (Kw/ha)	85.583	80.76	80.58
	8. Jumlah produksi padi (Ton)	1,428,883	1,227,278	1,058,812
	9. Jumlah produksi jagung (ton)	402,486	424,441	379,789
	10. Jumlah produksi kedelai (ton)	13,047	12,959	53,881
	11. Jumlah produksi Kacang Tanah (ton)	4,960	1,968	13,808

12. Jumlah produksi Kacang Hijau (ton)	1,062	704	1,766
13. Jumlah produksi ubi kayu (ton)	3,058	2,958	2,616
14. Jumlah produksi ubi jalar (ton)	8.199	4,918	9,287
15. Jumlah produksi bawang merah (ton)	2,562	2,003	1,225
16. Jumlah produksi cabe rawit (ton)	1,603	1,351	1,359
17. Jumlah produksi sukun (ton)	4,005	3,931	3,916
18. Jumlah produksi pisang (ton)	22,959	16,802	14,340
19. Jumlah produksi nangka (ton)	2,421	2,408	2,400
20. Jumlah produksi kakao (ton)	10,692	12,234	18,079
21. Jumlah produksi kelapa (ton)	14,282	15,569	15,180
22. Jumlah produksi tebu (ton)	40,561	40,133	3,571
23. Jumlah produksi cengkeh (ton)	4,949	4,744	4,748

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa capaian kinerja mengalami kenaikan namun ada pula yang mengalami penurunan. Fluktuasi capaian kinerja produksi dan produktivitas terutama disebabkan faktor dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil produksi tanaman.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah

Pencapaian target jangka menengah merupakan bentuk kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Capaian kinerja jangka menengah merupakan tahapan membandingkan antara realisasi tahun 2018 dengan target lima tahunan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Evaluasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2018	Prosentase (%)
Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan produksi,	1. Jumlah produksi padi (Ton)	1,040,780	1,428,883	137.29
	2. Jumlah produksi jagung (ton)	186,755	402,486	215.52
	3. Jumlah produksi kedelai (ton)	22,482	13,047	58.03
	4. Jumlah produksi Kacang Tanah (ton)	3,249	4,960	152.66
	5. Jumlah produksi Kacang Hijau (ton)	11,802	1,062	9.00

produktivitas dan mutu hasil pertanian dan perkebunan yang berdaya saing.	6. Jumlah produksi ubi kayu (ton)	5,159	3,058	59.28
	7. Jumlah produksi ubi jalar (ton)	4,329	8.199	0.19
	8. Jumlah produksi bawang merah (ton)	2,500	2,562	102.48
	9. Jumlah produksi cabe rawit (ton)	1,600	1,603	100.19
	10. Jumlah produksi kakao (ton)	1,000	10,692	1,069.20
	11. Jumlah produksi kelapa (ton)	3,200	14,282	446.31
	12. Jumlah produksi tebu (ton)	8,000	40,561	507.01
	13. Jumlah produksi cengkeh (ton)	1,000	4,949	494.90

Berdasarkan tabel 3.4 tampak bahwa target jangka menengah renstra sebagian telah tercapai pada tahun 2018 bahkan ada yang telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini karena intensifnya upaya-upaya pencapaian target produksi. Sebagian lagi sedikit mendekati target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dan diharapkan tahun-tahun berikutnya kekurangan tersebut telah dapat dicapai atau melebihi target yang telah ditetapkan.

d. ***Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional***

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target Nasional	Realisasi Tahun 2018	Prosentase capaian (%)
Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian dan perkebunan yang berdaya saing.	1. Jumlah produksi padi (Ton)	80 juta	1,428,883	1.79
	2. Jumlah produksi jagung (ton)	30 juta	402,486	1.34
	3. Jumlah produksi kedelai (ton)	2.9 juta	13,047	0.45

Berdasarkan tabel 3.5 tampak bahwa produksi padi, jagung dan kedelai memberikan kontribusi terhadap produksi nasional terutama produksi padi yang menyumbang lebih dari 1% (1,79%) terhadap produksi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pertanian dalam pencapaian produksi

dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Bone telah berhasil dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target. Berdasarkan tabel 3.2 maka analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja tahun 2018 didukung dengan dilaksanakannya penerapan metode dan teknologi budidaya tepat guna spesifik lokasi antara lain : Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), pengendalian hama terpadu, peningkatan kemampuan lembaga petani sehingga petani semakin meningkat pengetahuan dan keterampilannya dalam berusahatani yang selanjutnya berdampak pada tercapainya produksi dan produktivitas tanaman, pengembangan komoditas unggulan di kawasan agropolitan, peningkatan kemampuan lembaga petani dan peningkatan kapasitas serta kompetensi tenaga penyuluh.

Hambatan yang dapat menurunkan pencapaian target sasaran ini adalah terjadinya kemarau, yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga produktivitas beberapa komoditi pertanian mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu; adanya alih fungsi lahan; beberapa komoditi perkebunan telah berumur tua sehingga tidak produktif lagi; keterbatasan biaya petani dalam melakukan kegiatan intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan untuk mengganti tanaman yang sudah tua. Solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memaksimalkan pengawalan dan perlindungan tanaman dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan. Namun secara keseluruhan target sasaran kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone Tahun 2018 dapat tercapai.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya adalah perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang diperoleh. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel. 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)	Anggaran (000)			Efisiensi (%)
			Alokasi	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7 = 3-6
Meningkatnya pengetahuan petani dalam sistem budidaya dan penanganan hasil pertanian yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian dan perkebunan yang berdaya saing.	1. Produktivitas Padi (Kw/ha)	100.31	30,268,655	28,525,712	94.24	6.49
	2. Produktivitas Jagung (Kw/ha)	107.30				
	3. Produktivitas Kedelai (Kw/ha)	105.12				
	4. Produktivitas Kacang Tanah (Kw/ha)	103.28				
	5. Produktivitas Kacang Hijau (Kw/ha)	114.06				
	6. Produktivitas Ubi Kayu (Kw/ha)	94.12				
	7. Produktivitas Ubi Jalar (Kw/ha)	96.34				
	8. Jumlah produksi padi (Ton)	137.29				
	9. Jumlah produksi jagung (ton)	215.52				
	10. Jumlah produksi kedelai (ton)	58.03				
	11. Jumlah produksi Kacang Tanah (ton)	152.66				
	12. Jumlah produksi Kacang Hijau (ton)	9.00				
	13. Jumlah produksi ubi kayu (ton)	59.28				
	14. Jumlah produksi ubi jalar (ton)	0.19				
	15. Jumlah produksi bawang merah (ton)	155.26				
	16. Jumlah produksi cabe rawit (ton)	100.18				
	17. Jumlah produksi sukun (ton)	85.21				
	18. Jumlah produksi pisang (ton)	143.49				
	19. Jumlah produksi nangka (ton)	53.80				
	20. Jumlah produksi kakao (ton)	105.68				
	21. Jumlah produksi kelapa (ton)	101.10				

	22. Jumlah produksi tebu (ton)	112.63				
	23. Jumlah produksi cengkeh (ton)	106.94				
	Rata - Rata	100.73				

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan sangat berhasil dan secara keseluruhan terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 6,49%. Efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target sasaran telah dilakukan secara optimal dengan menekan penggunaan anggaran seefisien mungkin.

g. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Ada 10 Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini yaitu : Program Pelayan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan; Standarisasi Kualitas Bahan Baku; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan Berkelanjutan. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut adalah

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung ke sepuluh program ini adalah sebesar Rp. 30.268.655.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.525.712.048,- atau 94,24%. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah selain kegiatan rutin terdapat pula kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis; Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis; Pemberdayaan Petani dan Pelaku agribisnis; Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis; Peningkatan Produksi Produktivitas dan mutu produk

pertanian/ perkebunan; Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija; Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering; Pengembangan Perbenihan/Pembibitan; Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna; Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan; Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian; Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan; Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan; Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi; Pengembangan Bibit Unggul Berkelanjutan.

a. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Penerimaan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada tahun 2018 sebesar Rp. 99.800.000,- sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 99.800.000,-

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 28.525.712.048,- (94,24%).

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 13.044.392.441,- (14,50%)
- Belanja Langsung Rp. 30.268.655.000,- (33,65%)

2. Sumber Dana APBN Rp. 46.638.378.194,- (51,85%)

Jumlah Rp. 89.951.425.635,- (100,00%)

3. Pemanfaatan Anggaran

1. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 13.044.392.411,- (93,79%) yang diarahkan untuk :

- | | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| - Gaji dan Tunjangan | Rp. | 12.097.503.380,- |
| - Tambahan Penghasilan PNS | Rp | 463.310.329,- |
| - Belanja Langsung | Rp. | 28.525.712.048,- |

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 28.525.712.048,- (94,24%) dengan jumlah program sebanyak 10 program dan 32 kegiatan.

2. Sumber Dana APBN

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang bersumber dari dana APBN melalui kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebanyak 5 kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia terdiri dari pelaksanaan rancangan program dan kegiatan Pengembangan Padi Jarwo Super, Persiapan Pengembangan Desa Pertanian Organik Untuk padi, Pengembangan Padi,dengan teknologi Haszton, Pengembangan Padi Inbrida/Sawah Tadah Hujan/Lahan Kering dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.027.864.000,-; Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan realisasi anggaran sebesar 37.000.000,-; Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 387.500.000,- Dengan Kegiatan Prasarana dan sarana realisasi anggaran sebesar 25.110.316.000,-. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi akibat adanya sisa belanja bahan akan dikembalikan ke kas negara. Adapun rincian komponen kegiatan adalah sebagai berikut :

Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
		Rp.	%	
Pengelolaan Produksi tanaman sereal	13.763.784.000,-	12.027.864.000,-	99,98	100
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	37.000.000,-	37.000.000	95,36	100
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	387.500.000,-	387.500.000,-	99,99	100
Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian	25.192.070.000,-	25.110.316.000,-	99,67	100
Kegiatan bidang Hortikultura	6.683.145.000,-	6.234.625.000,-	93,29	100

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bone Tahun 2018 berisi gambaran keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan sekaligus memberikan data dan informasi bagi penentu kebijakan. Capaian kinerja yang memuaskan merupakan hasil kerjasama seluruh aparatur Kabupaten Bone dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Bone telah melaksanakan beberapa program pada tahun 2018 dengan capaian kinerja yang memuaskan sehingga pelaksanaan sasaran strategis telah tercapai berdasarkan penetapan indikator kinerja tahun 2018.
2. Agar kinerja personil pengelola kegiatan dapat di tingkatkan maka di sarankan bimbingan teknis baik di bidang keuangan maupun administrasi kegiatan dari pemerintah Kabupaten Bone secara rutin.
3. Agar indikator kinerja dapat ditetapkan secara tepat maka dukungan data yang akurat akan sangat menunjang. Untuk itu diperlukan personil yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Kebutuhan personil yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut agar didukung oleh penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuannya.

4. Diperlukan intervensi program nasional untuk merelevansikan pencapaian kinerja berdasarkan target nasional yang telah dijabarkan ditingkat provinsi.
5. Diperlukan inovasi manajemen untuk memberi peran dan partisipasi bagi investor maupun pelaku usaha agar kemandirian petani dapat menghasilkan kesejahteraan.
6. Perlu membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan inovasi mengakses sumber permodalan bagi pelaku usaha bidang pertanian.
7. Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.